

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, Prof. Dr. SH. MH., Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta, CV. Diadit Media : 2009
- Amrullah, Arief, Money Laundering = Tindak Pidana Pencucian Uang : Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional, Malang, Bayumedia Pub : 2003.
- Djumhana, Muhammad, Drs. SH., Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti : 2006.
- Djumhana, Muhammad, Drs. SH., Asas-Asas Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti : 2008.
- Fuady, Munir, Dr. SH. MH. LL.M., Hukum Perbankan Modern, Bandung, Citra Aditya Bakti : 2004.
- Gautama, Sudargo, Prof, Dr., Indonesia Business Law, Bandung, Citra Aditya Bakti : 2006.
- Husein, Yunus, Dr. SH. LL.M., Bunga Rampai Pencucian Uang, Bandung, Book Terrace & Library : 2007.
- Hermansyah, SH. MHum., Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2005.
- Irman, T.B., Drs. SH. MH., Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta, Bandung, MQS Publishing : 2007.
- Isra, Saldi, Catatan Hukum Saldi Isra Kekuasaan dan Perilaku Korupsi, Jakarta, Penerbit Buku Kompas : 2009
- Lamintang, P.A.F., Drs, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti : 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, Prof. Dr. SH. Ms. LL.M., Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2008
- Sasangka, Hari, Drs. SH. MH., Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung, CV Mandr Maju : 2003.

Sjahdeni, Sutan Remy, Prof. Dr. SH., Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta, Grafiti : 2007.

Sjahputra, Iman, SH., CN., LLM., Money Laundering (Suatu Pengantar), Jakarta, Harvindo : 2006.

Soemodihardjo, R. Dyatmiko, Drs. SH. MHum., Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka : 2008.

Sutedi, Adrian, SH. MH., Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika : 2008.

Sutedi, Adrian, SH. MH., Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, Citra Aditya Bakti : 2008.

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Grafiti : 2003.

B. Jurnal

Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta 2008.

Husein, Yunus, Dr. SH. LLM., Rezim Anti Pencucian Uang dan Peranannya Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi, Mahkamah Agung RI, Ciawi Bogor, 4 November 2009.

Novian, Muhammad, Rezim Anti Pencucian Uang dan Kelembagaan PPATK, Medan 5 November 2009.

C. Internet

“PPATK Laporkan 585 Kasus Pencucian Uang”, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/25/16324390/ppatk.laporkan.585.kasus.pencucian.uang>, 5 September 2008.

“PPATK temukan 375 transaksi bermasalah”, <http://www.harianterbit.com:80/artikel/rubrik/artikel.php?aid=51501>, 5 September 2008.

“Seribu Lebih Transaksi Uang Di Daerah Mencurigakan”, <http://www.kompas.com>, 6 September 2008.

http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=887&mn=6&smn=a,
23 October 2009.

<http://bisnis.vivanews.com/news/read/90506-bpkgandengppatkauditdeposanbesarcentury>,
23 October 2009.

<http://www.antara.co.id/print/1210857233>, 23 October 2009.

<http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/17649/PPATK-Barter-Info-dengan-Makau-dan-Fiji>, 23 October 2009

<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf>, 30 November 2009.

<http://istilahbank.blogspot.com/>, 30 November 2009.

“Implementasi Prinsip Pengenalan Nasabah (KYC/PMN)”,
<http://www.pnm.co.id/content.asp?id=848&mid=53>, 30 November 2009

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 21/KEP.PPATK/2003 Tanggal 9 Mei 2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

E. Lain-lain

Materi kuliah Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., Law and Economic Development, Senin, 19 Februari 2007

